



Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kepada Masyarakat yang Terdampak COVID-19 (Studi Kasus di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek)

Dandi Yunas Nur Fanni ¹⁾, Saiman ²⁾, Asep Nurjaman ³⁾

Universitas Muhammadiyah Malang
Jl Raya Tlogomas No 246, Malang

Dandifanni309@gmail.com¹⁾
saiman@umm.ac.id²⁾
asepip@umm.ac.id³⁾

Abstrak

Perkembangan Covid-19 yang melanda Indonesia ternyata berdampak terhadap kepada beberapa sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggungjawab penuh terhadap penanganan covid-19 di Indonesia melalui bantuan sosial ternyata menyimpan beberapa permasalahan ketika penyaluran bantuan sosial dilaksanakan. Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang terdampak sektor ekonominya akibat pandemi covid-19. Permasalahan yang terjadi, Kabupaten Trenggalek ini disebabkan oleh ketidakvalidan data penerima bantuan sosial. Ketidakvalidan data yang terjadi di Desa Kerjo ini disebabkan karena tidak adanya pembaharuan data secara berkala, tumpang tindih kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dan kurangnya sosialisasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Metode studi pustaka ini mengambil dari berbagai sumber kepenulisan ilmiah. Penulis juga mengambil data primer yang berasal dari hasil observasi langsung di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai sumber literatur.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Jaring Pengaman Sosial, Covid 19

Abstract

The development of Covid-19 that hit Indonesia turned out to have an impact on several sectors, one of which was the economic sector. The government, which has full authority and responsibility for handling COVID-19 in Indonesia through social assistance, turns out to have several problems when distributing social assistance. Kerjo Village, Trenggalek Regency is one of the villages affected by the economic sector due to the Covid-19 pandemic. The problem that occurred, Trenggalek Regency was caused by invalid data on recipients of social assistance. The invalidity of the data that occurred in Kerjo Village was due to the absence of regular data updates, overlapping policies carried out by the Central Government, and the lack of socialization about social assistance to the community. In this study the authors used the literature study method. This literature study method takes from various sources of scientific writing. The author also took primary data from direct observations in Kerjo Village, Trenggalek Regency. Meanwhile, secondary data were taken from various literature sources.

Keywords: Social Assistance, Social Safety Net, Covid 19



PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 31 Desember dunia mendapatkan sebuah laporan dari World Health Organization (WHO) China Country Office yang melaporkan sebuah penemuan sebuah virus baru yang dengan cepat menyebar didaerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Alhasil, seluruh warga yang tinggal didaerah Wuhan harus melakukan lockdown atau pembatasan aktivitas diluar ruangan dengan sangat ketat untuk mengurangi penularan virus corona. Hubei yang merupakan sebuah provinsi di Tiongkok dengan jumlah populasi dan menjadi salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Tiongkok, yang mencapai 11 juta penduduk. Karena virus ini merupakan sebuah virus yang masih terbilang baru eksistensinya, dengan penularannya yang begitu cepat dengan bertransmisi dari manusia ke manusia lain. Akhirnya, tepat pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan jika penyebaran virus tersebut menjadi darurat kesehatan berskala global.

Melihat data dari Johns Hopkins University, pada tanggal 23 Juli 2020, virus corona ini telah menyebar lebih dari 193 negara dengan jumlah yang manusia yang sudah terinfeksi sebesar 15,097,102 jiwa. Selain itu, JHU juga mencatat jika 620,688 jiwa meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. Penemuan kasus pertama di Indonesia tercatat pada tanggal 2 Maret 2020 yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya tahun lalu. Penemuan itu pertama terjadi pada dua orang yang sedang datang kesebuah tempat dan menjalin interaksi dengan warga negara Jepang. Dari kasus itu, penambahan kasus yang tercatat di Indonesia saat ini, pertanggal 28 Agustus 2021, menurut data dari JHU CSSE Covid-19 tercatat sebanyak 4,06 Juta penduduk Indonesia yang terinfeksi virus corona dan juga sebanyak 131.000 Jiwa dinyatakan meninggal dunia karena kasus tersebut (JHU, 2021).

Sejak terjadinya peningkatan covid-19 yang sudah berstatus pandemi secara global, hal ini semakin membuat kekhawatiran yang dirasakan dari berbagai kalangan. Termasuknya adalah warga Indonesia. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat ketika terjadi lonjakan kasus yang terjadi di Indonesia setiap hari mengalami kenaikan secara signifikan. Dari kasus lonjakan tersebut, akhirnya pemerintah mengambil sebuah tindakan preventif guna mengurangi laju penambahan kasus yang ada di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dirancang oleh pemerintah yang berupa pembatasan masyarakat berskala besar diharapkan mampu menjadi sebuah terobosan yang bisa menjadi bentuk antisipasi adanya lonjakan kedepannya (Hanoatubun, 2020).

Seiring bertambahnya kasus harian, akhirnya pemerintah Indonesia menyatakan jika Covid-19 adalah sebuah bencana nasional dan indakan. Adanya kasus Covid yang melanda Indonesia yang semakin tidak terkontrol, akhirnya pemerintah membuat sebuah kebijakan yaitu, Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB). Kebijakan ini dirancang oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang beraktivitas ditempat umum. Pembatasan ini berupa mengurangi jumlah pengunjung dan juga penurunan jam operasional bagi tempat usaha. Kebijakan PSBB ini memang sebenarnya untuk memutus mata rantai penyebaran covid. Tapi ternyata dilain sisi, masyarakat turut merasakan dampak yang sangat serius dengan adanya kebijakan PSBB tersebut. Dengan adanya jumlah pengurangan pengunjung dan juga jam operasional, ini berarti akan memangkas pendapatan masyarakat yang bergerak dibidang bisnis. Pada awal kebijakan ini dilakukan, banyak sekali kasus PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk memangkas karyawannya, karena income yang tidak cukup jika harus memberikan gaji kepada seluruh karyawan. Selain itu, kebijakan ini juga mengharuskan para karyawan untuk Work From Home atau bekerja dirumah.

Dampak yang sangat dirasakan tentu masalah ekonomi, termasuk Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang dengan jumlah rata-rata pendapatan yang masih minim, PSBB telah merugikan masyarakat banyak dibidang bisnis. Dengan adanya dampak ekonomi tersebut, pemerintah memberikan sebuah Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakatnya yang terkena dampak covid dengan pendapatan yang kurang untuk bisa bertahan hidup. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sembako dan juga bantuan sosial tunai dalam rangka penanganan dampak covid bagi masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PHK), Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra Kerja,



Pembebasan Biaya Listrik dan yang terkahir adalah Bantuan Langsung Tunai. Masyarakat yang bisa menerima bantuan ini adalah masyarakat kurang mampu (Kusuma, 2020). Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan ini sudah menganggarkan sebanyak Rp. 110 Triliun yang akan digunakan untuk keperluan bantuan sosial. Maka dari itu, pemerintah pusat mengajak dan juga memerlukan indakan sampai pemerintah desa. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya indakan pusat dan daerah diharapkan bantuan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa tepat sasaran (Hafiz, 2021).

Bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah memang untuk menanggulangi permasalahan masyarakat yang memang terdampak covid-19, Indonesia yang merupakan peringkat ke-4 didunia dengan penduduk terbanyak menyebabkan permasalahan kemiskinan semakin bertambah seiring berkembangnya indakan yang dirasakan oleh Indonesia. Berdasarkan data Kemenaker, pada 27 Mei 2020, terdapat pada sektor formal yang mencapai 1.058.000 orang yang bekerja WFH dan 380.221 orang mengalami PHK, sedangkan dalam sektor non-formal terdapat 318.959 orang yang terdampak PHK dan WFH. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, hal tersebut telah membuat Indonesia terkhusus pemerintah harus mencari solusi secepat mungkin untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, ditambah ratusan ribu orang terkena dampak dari indakan ini, menyebabkan bertambahnya jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia (CNBC Indonesia, 2020).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, kemiskinan merupakan sebuah kondisi ekonomi yang ada di masyarakat, yang berupa indakan tau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270.203.911 jiwa ternyata terdapat 26,42 juta masyarakat yang masih dalam kondisi ditaraf ekonomi yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2020). Jika melihat data jumlah masyarakat miskin di Indonesia, dengan jumlah penambahan yang disebabkan oleh masyarakat yang terdampak covid, perlu adanya upaya dari pemerintah agar bisa meminimalisir jumlah kemiskinan yang terjadi di Indonesia serta bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak covid-19.

Program bantuan sosial yang merupakan program percepatan dalam rangka menangani masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 ini ternyata menyebabkan permasalahan baru. Hal ini dikarenakan sempitnya waktu yang tersedia untuk memverifikasi data rumah tangga miskin. Mulai dari mengkoordinasikan kegiatan penyimpanan data rumah tangga miskin dan mengelompokkan kartu tanda pengenal rumah tangga miskin serta memberikan akses data untuk instansi pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial. Maka dari itu ada sebuah isu yang mencuat tentang ketikadanya validasi data yang akurat dilapangan (Puti, dkk, 2021).

Trenggalek yang merupakan Kabupaten yang berada di selatan Jawa Timur juga turut merasakan dampak adanya Covid ini. Kabupaten Trenggalek yang memiliki penduduk kurang lebih 700.000 orang. Pada tanggal 27 Agustus 2021, sebanyak 7.526 orang telah terinfeksi dan 951 orang telah meninggal dunia. Maka pemerintah Kabupaten Trenggalek menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 4. Kabupaten Trenggalek, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani, dengan hasil pendapatan yang masih tidak pasti. Pemerintah Indonesia yang bertanggungjawab atas kemunduran ekonomi, memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat menengah kebawah yang terdampak dengan adanya Covid-19. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat yang membutuhkan, tetapi pada kenyataannya, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar dan tidak tepat sesuai sasaran.

Seperti yang terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek terdapat 273 paket bantuan berupa beras 10 kg per-KK yang ternyata belum bisa berjalan secara maksimal dan sesuai dengan sasaran. Hal ini dikarenakan belum adanya integrasi data yang valid, dan masih diinput secara manual. Pendataan masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan sembako tersebut masih sering ditemukannya masalah, karena mereka tidak kebagian sembako bahkan data yang disajikan sangatlah berbeda ketida sudah terjun langsung



kelapangan, ada beberapa masyarakat yang mampu mengaku menjadi keluarga yang harus disantuni bantuan sosial ini. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas tentang permasalahan ketidakvalidan data penerima bantuan sosial yang ada di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi indaka, yang mana metode ini dilakukan dengan cara mencari data dan informasi melalui dokumen tertulis, buku, jurnal, foto ataupun bentuk lainnya yang bisa mendukung penelitian ini. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui cara wawancara, sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku dan juga internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi yang melanda Indonesia ternyata masih terus berlangsung sampai saat ini. Termasuk yang terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek yang turut merasakan dampak dari indakan covid-19. Pemerintah terus menekan laju vaksinasi masal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melihat data dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, per tanggal 12 September 2021. Kemenkes memiliki targer sebanyak 208,265,720 penduduk Indonesia harus bisa mendapatkan vaksin. Terlihat dalam laman tersebut, sebanyak 72,876,368 orang telah mendapatkan dosis pertama. Sedangkan sebanyak 41,785,594 orang telah mendapatkan dosis kedua (Kemenkes RI). Hal ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna segera mencapai Herd Immunity. Alasan paling kuat pemerintah menekan vaksinasi ini adalah untuk bisa membuat perekonomian di Indonesia bisa berjalan sedia kala.

Beberapa lembaga ekonomi global telah memprediksikan jika ekonomi Indonesia pasca indakan mengalami perlambatan perkembangan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Bahkan, pemerintah telah membuat sebuah rencana jika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 bisa mencapai 2,3% dari target APBN 2020 sebesar 5,3%. Dengan adanya hal ini, sudah dipastikan jika indakan jumlah kenaikan kemiskinan.

Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial menyatakan jika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diperbarui secara masif sejak tahun 2015. DTKS adalah sebuah data yang bisa dijadikan rujukan dalam menentukan penerima bantuan sosial akibat terdampak Covid-19. Kebijakan Jaring Pengaman Sosial yang ada di Indonesia ini bertujuan untuk menyediakan sebuah validasi data orang miskin yang diintegrasikan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemberian data ini memiliki tujuan agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target pemerintah. Karena bagaimanapun juga, pemerintah harus mengantisipasi tentang kemungkinan adanya sebuah penyelewengan yang akan terjadi dalam proses penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Meskipun perangkat desa telah memiliki data acuan agar penyaluran bantuan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Ternyata pada kenyataannya, masih ditemukannya permasalahan ketika perangkat desa mencoba untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut. Ada beberapa orang yang layak mendapatkan bansos ternyata tidak masuk dalam data. Hal inilah yang membuat beberapa masyarakat merasa dirugikan, karena data menyebutkan bansos tersebut diberikan kepada masyarakat yang mampu. Ketidak akuratan data tersebut membuat penulis memiliki beberapa sub-bahasan yang akan dijelaskan.

Stimulus Bantuan dari Pemerintah dalam Bentuk Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 sebagai salah satu stimulus pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang berstatus kurang mampu dan terdampak Covid-19. Bantuan tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi pengeluaran dalam segi pangan dalam keluarga penerima bantuan. Selain itu, stimulus ini diberikan dalam rangka peran pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).



Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya bukanlah sebuah yang baru, ketika ada bencana alam pemerintah selalu sigap dalam memberikan bantuan kepada korban yang tengah terdampak. Tetapi, selama indakan ini ternyata membuat pemerintah pusat dan juga daerah kelimpungan untuk bisa mendata masyarakat yang memang layak untuk diberikan bantuan. Hal ini dikarenakan kurangnya survei dan juga pendataan yang ada ditingkat daerah (Ihsanuddin, 2020).

Sebenarnya bentuk program yang ditawarkan oleh pemerintah ini memiliki nilai yang sangat bagus dalam mengatasi masyarakat yang memang terdampak Covid-19. Permasalahan pemberian bansos ini ternyata tidak hanya terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek. Tetapi juga ada kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, permasalahan ini terjadi karena adanya kenaikan harga pangan hingga mencapai Rp. 500/kg untuk beras dan juga telur (Litbang Pertanian). Dalam kasus inilah akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa sembako dibandingkan memberikan uang tunai. Tujuan dari pemberian program bantuan tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat pada saat indakan Covid-19. Bantuan-bantuan tersebut didistribusikan keseluruh wilayah Indonesia, dan diharapkan bisa menysasar langsung kepada masyarakat yang memang terdampak (Budiani, 2007).

Tujuan dari pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan selama Covid-19 yakni untuk tetap melindungi dan juga meringankan beban yang ditanggung oleh masyarakat terutama bagi yang terdampak pandemic. Dalam melihat indikator tercapainya sebuah keberhasilan program Bantuan Sosial untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemic, karena efektivitas merupakan sebuah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan (Budiani, 2007).

Validasi Data di Desa Kerjo

Permasalahan yang terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek akibat data bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Penemuan ketidakvalidan data dilapangan terjadi, akibat salah input dan kurangnya survei dari pihak perangkat desa secara teliti. Dengan adanya pendataan yang kurang valid, telah menimbulkan permasalahan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya layak dan membutuhkan bantuan tersebut.

Meskipun Pemerintah Pusat telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial terdampak Covid-19. DTKS diambil dari hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa. Meskipun begitu, dengan adanya DTKS tersebut tidak bisa menjamin bahwa bantuan bisa disalurkan sesuai dengan target. Ketika bantuan sosial diberikan kepada masyarakat secara langsung, masih ditemukannya sebuah masalah. Masalah tersebut terjadi karena bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bansos. Mereka yang masih bekerja secara aktif, dan juga masih bisa mencukupi kehidupan keluarganya mendapatkan bansos. Berbeda dengan data yang menunjukkan, masyarakat yang kurang mampu belum kebagian bansos tersebut.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek adalah adanya warganya yang memang sudah pindah domisili tetapi tidak melaporkannya kepada RT setempat. Akhirnya dalam data tersebut, mereka masih tercantum dalam data penerima bansos. Hal inilah yang membuat permasalahan validasi data yang ada didesa tersebut semakin kompleks. Dalam data yang diperoleh dari penulis menjelaskan, jika ada beberapa warga yang sudah menerima bansos tetapi masih meminta bagian untuk kedua kalinya, mereka menganggap bantuan tersebut tidak cukup untuk mencukupi kehidupan pangan keluarga mereka. Dengan adanya permasalahan tersebut, ada beberapa indakan yang harus segera dilakukan. Tindakan tersebut bisa berupa sebuah Tindakan update yang harus dilakukan secara berkala. Jadi, ketika pemerintah desa membutuhkan data-data yang memang nasyarakat yang memerlukan bantuan tersebut sudah bisa difilter secara bijaksana.

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan data yang ada di Desa Kerjo memang harus saling bekerjasama, koordinasi dan juga harmonisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan RT/RW yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan



program penyaluran bansos dari pusat. Dengan adanya Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Desa bisa berjalan sesuai dengan garis koordinasi yang bagus agar tercapainya tujuan pemberian bansos mampu berjalan dengan maksimal.

Kurang Tepatnya Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Didalam sebuah pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19 ternyata masih ditemukannya beberapa kasus yang salah sasaran, hal ini sebenarnya akan memberikan dampak buruk kepada kebijakan basos yang telah diberikan oleh pemerintah. Jika hal ini terus berlanjut, maka masyarakat yang kurang mampu ditengah pandemic ini akan semakin sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika melihat dari permasalahan yang terjadi di Desa Kerjo, Kabupaten Trenggalek membuktikan jika ketepatan data yang ada di pemerintahan desa masih kurang akurat data yang diperoleh. Seharusnya, permasalahan seperti sudah harus diantisipasi bagi perangkat desa sebelum menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Perangkat desa harus meng-update data secara berkala agar data yang didapatkan bisa sesuai dengan target. Selain itu, perangkat daerah seharusnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait program yang akan diberikan. Sosialisasi merupakan tahap pertama yang lumayan efektif untuk memperkenalkan sebuah bantuan yang akan mereka dapatkan. Selain akan meningkat nilai keefektivitasan tersebut, sosialisasi tersebut akan turut meningkatkan pengetahuan dan juga tujuan dari bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah.

Pemberian bantuan dari pemerintah terkesan belum adanya persiapan yang matang. Hal ini terlihat dengan masih adanya ketimpangan kebijakan yang membuat penyaluran bantuan kepada masyarakat terkesan lambat dan kurang efisien. Selain itu, permasalahan tidak sesuai sasaran yang membuat bantuan sosial ini tersendat ketika akan diimplementasikan kepada masyarakat (Mufida, 2020). Pendistribusian bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat dilihat juga kurang optimal karena adanya sebuah ketidaksiapan dari pihak pemerintah dan juga kurang siapnya sistem pendukung keputusan untuk menentukan keluarga miskin mana yang seharusnya bisa mendapatkan bantuan (Hirawan, 2020).

Masyarakat yang ada di Desa Kerjo tidak pernah mendapatkan sosialisasi tersebut, sehingga mereka hanya sekedar menerima bantuan tersebut sampai didepan rumah mereka masing-masing. Sehingga mereka merasa bingung, bantuan itu diberikan oleh siapa dan untuk apa. Kasus tersebut biasanya tidak hanya terjadi ketika bantuan sampai didesa dan langsung disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat, terkadang pihak perangkat desa memberikan sebuah undangan yang bisa ditukarkan ke balai desa untuk bisa mencairkan bantuan tersebut. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, memang sangat perlu adanya indakan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan ketepatan sasaran. Jika hal ini bisa dimaksimalkan, maka bantuan yang diberikan oleh pusat bisa sesuai dengan target sasaran.

Dengan semakin banyaknya regulasi dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak harmonis dan sejalan dengan masyarakat menimbulkan problematika baru ditengah masyarakat yang panik akibat wabah covid-19 (Mufida, 2020). Dalam hal ini, pemerintah menginginkan masyarakat untuk tetap patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat, tetapi kebijakan dan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga hal inilah yang membuat masyarakat bingung untuk bisa melakukan sebuah indakan.

Mekanisme Self Reporting bagi Masyarakat yang Membutuhkan Bantuan

Karena permasalahan yang paling mendasar dalam permasalahan ini adalah tentang validasi data yang terdapat di Desa Kerjo. Ternyata memang perlu sebuah partisipasi langsung dari masyarakat yang terdampak langsung covid-19. Self Reporting adalah salah satu mekanisme yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk bisa mendata para masyarakatnya secara adil dan juga berkelanjutan. Dalam hal ini adalah self reporting



berperan dalam meningkatkan kesadaran dari masyarakat langsung, dengan cara memberikan laporan kondisi ekonomi dari masing-masing Kepala Keluarga ke Kelurahan/pengurus desa terlebih dahulu.

Dengan adanya self reporting ini, diharapkan bisa mengupdate data lama dengan data baru yang lebih valid. Jadi ketika ada bantuan apapun yang berasal dari pemerintah bisa disalurkan secara tepat sasaran. Koordinasi dari pihak desa dan juga RT/RW harus saling bisa bekerjasama dengan adanya mekanisme self reporting ini. Hasil dari data yang telah didapatkan langsung bisa diolah oleh pihak desa.

Salah satu contoh Tindakan koordinasi yang bisa dilakukan oleh pihak desa adalah dengan cara melibatkan langsung RT/RW tersebut. Mereka berperan dalam tugas survei yang dilakukan secara langsung dari beberapa orang yang telah mendaftarkan dirinya kepada pihak Pemerintah Desa. Hal ini dilakukan untuk mengecek validitas hasil dari self reporting. Apakah benar orang-orang yang melaporkan keadaan ekonominya begitu berdampak covid-19 dan apakah layak untuk mendapatkan bantuan sosial.

Perlunya Peningkatan Digitalisasi untuk Para Perangkat Desa

Pada saat ini, kita semua tengah hidup didunia yang serba dengan digitalisasi. Semakin dinamisnya perkembangan yang ada ditengah-tengah kita juga turut mengubah perilaku manusia. Ketika pada jaman dulu, untuk mengurus sebuah KTP, Surat Tanah, ataupun urusan tentang administrasi, kita harus datang langsung kelokasi. Berbeda dengan jaman sekarang yang memang semua sudah serba digital membuat pengurusan akan menjadi lebih muda dan juga efisien.

E-Governance atau Electronic Governance yang merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah agar lebih mempermudah masyarakat pada umumnya dalam penyelesaian urusan administrasi. Perangkat Desa Kerjo seharusnya lebih bisa memaksimalkan adanya e-gov ini bisa dimaksimalkan secara maksimal. Dengan penguatan dan pemanfaatan secara maksimal ini diharapkan permasalahan terkait dengan bantuan sosial, dan juga yang berkaitan dengan validasi data bisa lebih bisa terukur dan juga akurat.

SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan tentang bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ternyata masih meninggalkan permasalahan yang berdampak terhadap penyaluran yang diberikan langsung kepada masyarakat. Permasalahan tersebut masih didominasi dengan adanya ketidak selarasan data yang ada di Pemerintahan Desa dengan keadaan dilapangan. Masih banyak ditemukan kurang validnya data yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa kepada pihak RT/RW sebagai actor yang menyalurkan bantuan sosial tersebut secara langsung kepada masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa harus memiliki garis koordinasi yang bagus, agar permasalahan pendataan penerima bantuan sosial bisa terhubung dan terkoordinir secara maksimal. Meskipun Pemerintah Pusat memiliki data yang bisa dijadikan sebuah acuan oleh Pemerintah Daerah/Desa, tetapi pada kenyataannya data tersebut masih belum diperbarui, sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang mengakibatkan tidak meratanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat.

Ada beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Desa dalam memaksimalkan penyaluran bantuan sosial dengan cara bekerjasama dengan pihak RT/RW dan juga warga masyarakat untuk turut serta melaporkan diri jika adaarganya yang memang membutuhkan bantuan sosial secara langsung kepada pihak setempat. Selain itu, bagi warga yang melakukan pindah tempat, diharuskan untuk melapor kepada pihak RT/RW agar datanya bisa diperbarui secara cepat. Hal ini akan membuat data yang ada dilapangan bisa diperbarui sesuai dengan keadaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Link : <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html> (Diakses 13 Oktober 2021).
Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang



Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 2. No.1.

CNBC Indonesia. Link: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200619110855-4-166535/phk-pekerja-belum-berakhir-ini-buktinya> (Diakses 13 Oktober 2021).

Hanoatubun, S., (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*. Vol. 2. No. 1. 146-153.

Hirawan, F. B. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Program during the COVID-19 Pandemic. (June), 1–7.

John Hopkins University of Medicine. Link : <https://coronavirus.jhu.edu/region/indonesia> (Diakses 28 Agustus 2021).

Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Retrieved June 24, 2020, from [nasional.kompas website: https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia](https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Link : <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> (Diakses pada 13 September 2021).

Kusuma, H. (2020). “Catat! Ini sederet bansos Pemerintah selama darurat corona.”. *Detikfinance*. Link : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4972353/catat-ini-sederet-bansos-pemerintah-selama-darurat-corona> (Diakses 28 Agustus 2021).

Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.

Putri, Eva, Auliya, dkk. (2021).”Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bambu)”. *Mataram. Jurnal Inovasi Penelitian*.

Ramadhani, Pipit Ika. (2020). Bansos corona tak tepat sasaran, KPK salahkan Pemda. *Liputan6*. Link : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4255749/bansos-corona-tak-tepat-sasaran-kpk-salahkan-pemda> (Diakses 26 Agustus 2021).

Hafiz, Muhammad. (2021). “Analisis Kesiapan Penganggaran Household atas Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia”. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara*.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2020. “Efektivitas Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Era Covid-19”. *Kementerian Pertanian*. Link : <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/opini/415-efektivitas-kebijakan-jaring-pengaman-sosial-di-era-covid-19#!/ccomment> (Diakses pada : 17 September 2021).